

PAPUA: Rekaman dan Catatan Kritis (16 – 30 Juni 2020)
Oleh: Theo van den Broek

Rekaman Peristiwa

1. Dalam suatu diskusi (*webinar 13/6/2020*) muncul pernyataan yang cukup penting untuk diperhatikan, yakni bahwa 'stigmatisasi' di Papua sebenarnya menghindari perhatian pada sejumlah isu kemanusiaan lainnya. Atau dengan kata lain: karena semua masalah di Papua dikaitkan dengan 'isu separatisme', dengan sengaja maupun tanpa sengaja, sejumlah masalah serius tidak diberikan tempat karena tenggelam dalam 'isu separatism' saja. Bandingkan saja apa yang terjadi dengan isu rasisme selama bulan Agustus-September 2019: masalah rasis dijawab oleh pemerintah dengan 'melawan separatisme', dan para aktivis demo anti-rasis ditangkap dan dituduh 'makar'. Seorang akademika Papua dari *Universitas Cendrawasih (Uncen)* menyatakan¹: di Papua tercipta suatu konstruksi politik yang membagikan para penghuninya dalam dua kelompok: ada yang pro-Papua Merdeka (separatis) dan ada yang pro-Indonesia (nasionalis). Stigma 'separatis' ditempel pada Orang Asli Papua (OAP). Konstruksi ini sangat merugikan karena membunuh semua diskusi mengenai masalah kemanusiaan lainnya. Malahan 'mau omong mengenai pengungsi di Nduga, kama takut dituduh makar'.
2. Pada hari Senin, 15 Juni 2020, polisi menangkap dan menahan 4 mahasiswa, anggota pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USTJ. Mereka ditangkap karena sedang menyelenggarakan aksi damai protes berhubungan dengan tuntutan hakim di Balikpapan. Mereka juga mendirikan sebuah posko di Kampus USTJ. Yang agak mengganggu adalah bahwa polisi sekarang menangkap orang di kampus yang lazimnya terjamin 'bebas akademis'-nya².
3. Papua kehilangan wewenang atas kepengurusan Sumber Daya Alam (SDA)? Ketua Komisi IV DPR Papua Bidang infrastruktur, Herlin Beatrix Monim mengatakan dengan tariknya Bidang Migas dari Dinas ESDM Provinsi (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 99 Tahun 2019), menjadi kekhawatiran satu demi satu kewenangan provinsi dalam menangani Sumber Daya Alam (SDA) akan ditarik ke pusat. "*Jadi saat ini Dinas ESDM tidak punya wewenang lagi di Bidang Migas. Ini menjadi sinyal bahwa sedikit demi sedikit kewenangan provinsi dalam menangani SDA ditarik ke pusat*", keterangan Ibu Herlin (16/6/2020). Dia juga mendasarkan kekhawatirannya atas informasi yang menyatakan bahwa beberapa daerah di wilayah Animha disinyalir memiliki kandungan gas³.
4. Ada keputusan untuk menunda pembahasan UU HIP (Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila). Dalam konferensi pers 16/6/202 MenkoPolHukum menyatakan bahwa alasannya: semuanya sudah diatur dengan baik; tidak perlu ada perubahan. Juga jelas bahwa Presiden tidak akan mengirim 'surat memohon pembahasan UU HIP' ke DPR⁴. Ternyata kritik yang sudah cukup intensif mendesak pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU HIP ini⁵. Akhir ini banyak partai politik mulai menolak RUU HIP⁶. Malahan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Ustad Tengku Zulkarnian, menyebut lima pimpinan lembaga terkesan diam atas polemik RUU HIP. Dimaksudkan BPIP, LAMHANAS, BIN dan Kapolri dan Panglima TNI. "*Ada apa dengan Anda semua...? Pak Kapolri dan BIN apakah sudah diusut siapa dan kelompok apa yang usulkan perubahan Pancasila jadi Ekasila dan Gotong Royong?*"⁷.

¹ Lihat <https://en.jubi.co.id/the-stigma-of-free-papua-mutes-other-humanitarian-issues-in-papua/>

² Lihat https://jubi.co.id/papua-empat-mahasiswa-ustj-ditangkap-polisi-di-kampus/?utm_campaign=

³ Lihat <https://www.pasificpos.com/komisi-iv-dpr-papua-khawatir-satu-persatu-kewenangan-provinsi-akan-ditarik-ke-pusat/>

⁴ Lihat Nasional.Kompas.com tgl. 16/6/2020

⁵ Lihat <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200620195231-32-515563/rachmawati-tolak-ruu-hip-anggap-bpip-tak-diperlukan>

⁶ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200623065948-32-516258/buang-badan-parpol-dari-hantu-komunisme-di-ruu-hip>

⁷ Lihat <https://fajar.co.id/2020/06/26/sebut-kapolri-dan-panglima-tni-diam-tengku-zulkarnian-ada-apa-dengan-anda-semua-?>

5. Dalam laporan sebelumnya (1-15 Juni 2020), kami sudah memuat berita di media sosial dari Persaudaraan Kelompok Nusantara Bersatu untuk mengajak para paguyuban siap karena mungkin akan ada demo anti rasis jilid III nanti setelah mendengar hasil keputusan tim hakim di Balikpapan. Ternyata pada hari yang sama (16/6/2020) juga ada pertemuan *Forum Paguyuban Nusantara Bersatu*. Hasil rapat diumumkan dan pada pokoknya menolak pembebasan para tahanan Papua di Balikpapan. Sebenarnya latarbelakang penolakan ini adalah kenyataan bahwa para 'migran' merasa sangat dirugikan (banyak orang tewas, barang dirusak, rugi miliaran, ribuan orang pulang) karena demo tgl 29 Agustus 2019 di Jayapura dan 23 September di Wamena. Kompensasi yang dijanjikan oleh pemerintah belum jadi. Sentimen ini masih sangat hidup dan bisa menjadi salah satu unsur yang akan mewarnai hubungan antar etnis dalam waktu mendatang. Kekecewaan para migran memang tidak dapat disangkal, namun kurang tepat juga kalau sentimen itu diandalkan untuk membenarkan tindakan yang tidak adil terhadap masyarakat adat Papua. Dalam berita hasil pertemuan itu tidak ada ajakan pada paguyuban untuk beraksi kalau nanti ada aksi dari kelompok Papua yang protes berhubungan dengan keputusan di Balikpapan. Forum menyatakan bahwa semuanya ini perlu diatur melalui hukum, dan kalau ternyata para tahanan dinilai bersalah, ya wajarlah dihukum dan perlu diterima⁸. Pernyataan *Forum Paguyuban Nusantara Bersatu (FPNB)* ditanggapi sejumlah orang dengan nada kritis dan jelas. Terutama diangkat bahwa dalam soal rasisme justru orang Papua menjadi korban dan sumber 'rasisme 2019' sebenarnya (para pelaku di Surabaya) justru dibenarkan oleh organisasi seperti FPNB. Sekaligus dipertanyakan sejauh mana para warga migran menempatkan diri sewajarnya di tengah-tengah masyarakat asli Papua yang menerima mereka di tanahnya dengan sangat terbuka hati⁹. *Pernyataan-pernyataan ini menggambarkan betapa pekanya segala isu-isu kemanusiaan dewasa ini di Papua. Dalam dinamika ini terselubung bahayanya peningkatan polarisasi OAP dengan warga non-Papua yang cukup membahayakan suasana kehidupan bersama dan munculnya konflik horizontal. Polarisasi demikian juga dapat merugikan kekompakan lembaga-lembaga, misalnya lembaga-lembaga keagamaan, dalam melawan ketidakadilan bersama atau berupaya bersama menciptakan budaya damai.*
6. Menjelang pengumuman keputusan oleh tim hakim ada demo damai oleh mahasiswa UNCEN di Waena, Perumnas 3, pagi hari, sedangkan kantor ALDP sekali lagi 'dijaga' oleh aparat. Pada salah satu foto kelihatan mobil polisi, yakni 'mobil tahanan' pas di depan pintu masuk kantor ALDP. Sedangkan di Wamena aparat berpatroli dengan memakai alat-alat berat (*show off kehebatan*) sehingga masyarakat berkesan bahwa kita sedang dalam keadaan perang! Juga di Sorong suatu demo sedang berjalan (jam 11.30 WIT). Di Jayapura 816 personel serta segala perlengkapannya dikerahkan untuk menjaga keamanan¹⁰.
7. Syukurlah, agak sore tanggal 17 Juni 2020, baru kita semua merasa lega, karena hasil persidangan di Balikpapan diketahui dan ternyata keputusan akhir telah mencerminkan bahwa segala aksi protes terhadap tuntutan memang didengar dan diperhitungkan sewajarnya. Vonis akhir: ke-tujuh tahanan politik Papua ini dihukumi tahanan di penjara selama 10 sampai 11 bulan! *Buchtar Tabuni, Agus Kossay dan Steven Itlay, masing-masing dapat hukuman 11 bulan, sedangkan Ferry Gombo, Alexander Gobay, Hengky Hilapok dan Irwanus Uropmabin masing-masing dapat hukuman 10 bulan*¹¹. Karena mereka sudah 9 bulan lebih dalam ketahanan, sisa waktu di penjara menjadi terbatas. *Diakui dan sangat bersyukur bahwa segala vonnis ini jauh lebih ringan daripada tuntutan oleh JPU, namun tetap perlu dicatat*

⁸ Lihat <https://tiffanews.com/lintas-paguyubun-nusantara-provinsi-papua-tolak-pembebasan-tersangka-makar/>

⁹ Lihat <https://monitorpapua.com/pernyataan-sikap-suara-orang-asli-papua-terhadap-paguyuban-nusantara/> ; <https://youtu.be/OJtlamKUUj8> serta https://jubi.co.id/papua-pernyataan-paguyuban-nusantara/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=whatsapp&utm_source=im

¹⁰ Lihat <https://en.antaranews.com/news/150944/816-security-personnel-deployed-in-jayapura-as-precautionary-measure>

¹¹ Lihat <https://jubi.co.id/hasil-sidang-putusan-7-tapol-buchtar-tabuni-divonis-11-bulan-penjara/>

subversion, rebellion) kalau mereka ingin para tahanan tidak disebutkan lagi ‘tahanan politik’ (tapol) di Indonesia. Koordinator Litigasi Koalisi, Emanuel Gobay, menyatakan (18/6) *pada dasarnya istilah ‘makar’ sangat tidak jelas sehingga hal itu sering dipakai untuk mengkriminalisasi warga. Dia mengutip dari laporan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang sempat dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017, dimana ICJR menyebut pemerintah juga kebingungan dalam memaknai istilah makar. Menurut ICJR ‘makar’ perlu diartikan sebagai suatu ‘norma hukum’ yang definisinya jelas. Dalam KUHP versi Belanda yang kini masih diadopsi Indonesia, makar di maknai sebagai ‘serangan’. Hal itu, berbeda dengan yang selama ini kerap diartikan makar sebagai ‘niat belaka’ saja. Definsi itu justru tidak jarang dipakai untuk melayangkan dakwaan dan putusan dalam sejumlah peradilan*¹⁶.

12. Ternyata pembatalan ‘naik haji’ tahun 2020 dari Indonesia oleh Menteri Agama, Fachrul Razi, masih belum dapat diterima dengan baik. Sekarang muncul ‘ancaman’ dari partai politik Golkar untuk melaporkan Menteri Agama kepada Presiden¹⁷.
13. Sekretaris II Dewan Adat Papua, John Gobai, menyatakan bahwa “penantian penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua ini seperti merebus batu yang tidak akan masak. Masyarakat Papua lama-lama tidak percaya penegakan HAM di Indonesia” (18/6/2020)¹⁸. Pernyataannya berhubungan dengan pengembalian berkas penyelidikan *Peristiwa Paniai* ke Komnas HAM untuk kedua kalinya oleh *Kejaksaan Agung (Kejagung)*. Ditambah lagi kasus *Wasior Berdarah* pada 2001 dan *Wamena Berdarah* pada 2003 belum rampung penyelidikannya sampai saat ini. Menurut pihak Kejagung RI, belum menemukan unsur-unsur pelanggaran HAM berat dalam perkara ini, maka sulit meningkatkan kasus ke tingkat penyidikan’. Jelas, keterangan ini sangat dapat dipertanyakan. Gobai menyarankan supaya Komnas HAM diberikan wewenang lebih luas, maka termasuk tahap penyidikan demi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Kalau tidak Kejagung dan Komnas Ham akan main ‘bola pingpong’ terus! “Atau pemerintah membentuk Pengadilan HAM di Papua sebagai pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 (UU Otsus).
14. Berita menarik juga. Pada hari Jumaat (19/6/2020) 14 purnawirawan TNI bertemu dengan Presiden Jokowi. Diantar oleh MenkoPolHukum yang telah mengatur pertemuan yang diminta para purnawirawan. Dalam kelompok ini termasuk a.l. Tri Sutrisno, Agum Gumelar dan Bambang Darmono (pernah memimpin *Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat-UP4B*). Pertemuan (19/6/2020) diminta oleh kelompok ini untuk ‘menyampaikan pentingnya pemerintah menjaga persatuan, kesatuan, kedaulatan dan ideologi Negara’. Dalam berita Kompas.com tidak ada detail lanjut mengenai isi pertemuan¹⁹.
15. Kita semua sudah sadar bahwa soal Covid-19 bukan soal kesehatan saja, namun juga berdampak sangat signifikan pada berkembangnya ekonomi serta pendapatan kita. Kepala *Bidang Neraca Wilayah Statustik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua*, Eko Mardiana, memberitahukan bahwa pandemi Covid-19 ini mulai terjadi pada pertengahan Maret lalu, maka dampaknya pada *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* triwulan I 2020 belum terlalu terasa (20/6/2020). Namun diprediksi bahwa dampaknya selama triwulan berikut pasti sangat nyata. Delapan sektor strategis menjadi rentan terkena dampak yang ditimbulkan. Kedelapan sektor adalah: {1} sektor pertanian: rentan terjadi kenaikan harga dan biaya konsumsi; {2} sektor pertambangan: rentan terjadi penurunan produksi, penurunan penjualan atau ekspor; {3} sektor industri: rentan terjadi penurunan permintaan dan rentan terhadap pemutusan hubungan kerja pekerja; {4} sektor konstruksi: tersendatnya bahan baku

¹⁶ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200618201914-12-514976/koalisi-ham-papua-desak-polisi-tak-lagi-gunakan-pasal-makar>

¹⁷ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200618173250-20-514878/golkar-ancam-laporkan-menag-ke-jokowi-usai-batalkan-haji-2020>

¹⁸ Lihat <https://tirto.id/penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-papua-seperti-merebus-batu-fJzT>

¹⁹ Lihat Nasional.kompas.com 19/6/2020 jam 10.42

yang berasal dari impor serta adanya isolasi pekerja; {5} sektor perdagangan: rentan terjadi penurunan permintaan, berkurangnya daya beli, rentannya sektor ritel informal dan usaha mikro kecil dan menengah; {6} sektor transportasi: terjadi penutupan bandara mulai tgl 26 Maret 2020; {7} sektor penyediaan akomodasi dan makan minum: terjadi pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat; {8} sektor pariwisata: rentan penurunan hunian kamar, omzet hotel, restoran transportasi dan jasa pendukung serta rentan PHK karyawan²⁰.

16. Kaget juga, 2 menteri menyatakan mengundurkan diri, yakni Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, dan Menteri Kesehatan, Tawaran. Dalam pertemuan dengan Presiden [21/6/2020] mereka menyampaikan keputusan mereka. Ternyata Luhut sudah merasa cukuplah kritikan yang dia hadapi dan julukannya sebagai 'Menkosaurus' (menteri koordinator segala urusan) dan memutuskan memberikan tenaganya pada pembangunan di bidang pendidikan di wilayah kelahirannya, sedangkan Tawaran merasa bahwa dia dinilai tidak kompeten, maka tidak dapat membangun kepercayaan masyarakat padanya. Jokowi menyesal keberangkatan kedua menterinya²¹.
17. Hari ini 22/6/2020 Pangdam XVII Cenderawasih ke Tambrau, Papua Barat, untuk bertemu dengan Pemerintah dan masyarakat berhubungan dengan rencana TNI untuk membangun Kodim disitu. Masyarakat adat sementara waktu menyatakan tidak setuju karena belum ada kesempatan untuk membahasnya bersama intern masyarakat adat. Maka mereka minta pemerintah untuk memungkinkan musyawarah masyarakat adat terlebih dahulu²². Dalam siaran pers 25 Juni 2020 kenyataan tadi diungkap dengan jelas. Pada dasarnya pihak Pangdam XIX Kasuari Papua Baru agar tidak melanjutkan pembangunan Kodim Tambrau hingga adanya dialog dan kesepakatan bersama antara masyarakat Adat Tambrau (5 suku: Abun, Meyah, Irees, Impur dan Bikar)²³.
18. Mengingat bahwa masa berlakunya Otonomi Khusus Papua (Otsus) akan berakhir tahun 2021, makin banyak orang dan instansi mulai memberikan perhatian pada perlunya suatu evaluasi mendahului revisi UU Otsus ini di DPR RI. Dari pihak Menteri Dalam Negeri DPR RI didesak untuk membahas 'draf UU Otsus baru' secepat-cepatnya karena sudah hamper masuk 2021 lagi. Kesannya bahwa Menteri Dalam Negeri sudah tahu apa yang mau diubah dalam versi Otsus Jilid II. Boleh saja, namaun gayanya sangat tidak disetujui banyak orang yang mengharapkan suatu dialog yang nyata mengenai isi UU Otsus Jld II itu²⁴.
19. Sudah tentu pandemi Covid-19 membawa serta banyak penderitaan dan kesusahan. Walau demikian ada sedikit positif juga. Melalui pandemic ini pemerintah makin sadar bahwa sebaiknya Indonesia tidak mengangungkan diri saja pada konsumsi beras, namun perlu mengembangkan peluangnya yang ada dalam bentuk membudidayakan sago. Sago adalah salah satu produk yang sangat bagus dan lebih sehat daripada nasi karena 'indeks glycemic'²⁵ lebih rendah. Apalagi 84% dari pohon sago bertumbuh di Indonesia. Areal pohon sago liar' di Indonesia sebesar 5,4 juta hectare, kebanyakan di Papua; sedangkan area 'pohon sago terawat' oleh masyarakat adat adalah 314.663 hectare. Memang banyak pekerjaan perlu dijalankan untuk mempromosikan penanaman sago sebagai alternatif untuk beras; apalagi semua warga Indonesia sudah dibiasakan dengan nasi. Namun dalam kerangka 'jaminan makanan' menurut Musdhalifah Machmud, wakil menteri makanan dan pertanian, kita makin menyadari bahwa sebaiknya 'kebudayaan sago' dikembangkan secara aktif²⁶.

²⁰ Lihat <https://www.pasificpos.com/delapan-sektor-ini-pengaruhi-capaian-pdrb-papua-triwulan-ii/>

²¹ Lihat <https://mojok.co/agm/ulasan/pojokan/pukulan-berat-jokowi-ditinggal-dua-menteri-saat-pandemi/>

²² Komunikasi pribadi

²³ Lihat <http://fransikanpapua.org/2020/06/25/siaran-pers-penolakan-pembangunan-kodim-di-tambrau/>

²⁴ Lihat <https://suarapapua.com/2020/05/10/polemik-otsus-butuh-dialog-jakarta-papua/> dan <https://jubi.co.id/segera-bentuk-tim-perundingan-untuk-otsus-2021/>

²⁵ a measure of how fast carbohydrates affect blood glucose levels in the body

²⁶ <https://ca.finance.yahoo.com/news/starchy-palm-tree-extract-may-033933218.html>

20. Ternyata di Jakarta juga instansi pemerintah mulai menyadari bahwa perkembangan 'penyebaran corona virus' di Jayapura sangat tinggi dan memprihatinkan [24/6/2020]. Dijelaskan bahwa yang tertinggi di Republik ini adalah Jakarta Pusat dengan rasio 149,2 per 100.000 penduduk; Jayapura no. 2 dengan rasio 108 per 100.000; Surabaya yang ke-3 dengan 107; Mimika menjadi urutan ke-7 dengan rasio 87; dan Kab Jayapura menjadi urutan ke-9 dengan rasio 73,7²⁷. Mulai sekarang mungkin 'Jakarta' akan memberikan lebih banyak perhatian dan bantuan pada Papua untuk mengatasi dampak Covid-19 ini.
21. Masalah 'Miras' (minuman keras) tetap merupakan suatu persoalan di Papua. Walau resmi dilarang, ternyata selalu tersedia. Polres di Timika sekarang ini cukup serius menangani pemberantasan beredarnya 'minuman keras' di wilayahnya. Untuk kali kedua dalam waktu singkat suatu 'pabrik' miras lokal ditemukan dan dihancurkan (24/6/2020). Yang menjalankan 'pabrik' kecil itu ditengah hutan, belum diketahui. Penduduk disekitar tempat pabrik kurang bersedia memberikan informasi karena, dugaan kuat, mereka dibawah tekanan si pemilik pabrik Miras itu²⁸.
22. Bukan saja Miras menjadi soal. Penyebaran narkoba tidak kalah memusingkan kita semua. Baru ini tim Polres Jayapura berhasil menangkap seorang yang diduga menjadi pengedar narkoba di Jayapura. Dia, Pato namanya, ditangkap dengan 16 paket ganja ukuran kecil dan sedang ditahan. Sementara masih dicari tahu mengenai jaringannya serta peranannya sebagai seorang penyebar ganja di kota Jayapura²⁹.
23. Suatu masalah lama dan sulit diberantas adalah kegiatan ekonomis yang ilegal. Soal penebangan kayu secara ilegal serta perdagangannya adalah satu. Suatu yang lain adalah penambangan emas ilegal di wilayah-wilayah yang terbukti mengandung bahan mahal itu. Suatu sindikat/jaringan penambangan ilegal jadi dibongkar oleh polisi di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pefak), Papua Barat. Polisi berhasil menangkap 4 koordinator lapangan di dua distrik masing-masing distrik Catubow dan Distrik Minyambauw. Sindikat ini berhubungan dengan orang di Makasar yang beraksi sebagai pemasok dananya. Identitasnya dua orang di Makasar diketahui polisi di Manokwari³⁰. Ternyata bukan saja di Manokwari polisi aktif memberantas penambangan emas liar, juga di wilayah Buper di Jayapura polisi menangkap sejumlah koordinator lapangan lahan penambangan liar³¹.
24. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengklaim bahwa dengan adanya 'tim terpadu' ada penurunan konflik sosial di Indonesia (25/6/2020). Menurutnya selama 2019 'peristiwa konflik sosial' menurun menjadi 31 peristiwa'. *"Penurunan konflik sosial itu berkorelasi dengan dibentuknya Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial (TTPKS) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia"*, kata Tito. Ternyata TTPKS dibentuk berdasarkan peraturan Mendagri no. 42 tahun 2015, dan sudah aktif dalam 34 provinsi dan 456 kabupaten/kota. *"Lantas ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas yang tersebar di 23 Provinsi dan 35 Kabupaten/kota. Ini jadi capaian pendukung stabilitas politik dalam negeri"*, kata Tito. Tak hanya itu, Mantan Kapolri itu menyatakan pihaknya mengklaim Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) meningkat pada tahun 2018 lalu. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) angka IDI meningkat dari 72,11 pada 2017 menjadi 72,39 di 2018. *"Lalu partisipasi politik di [Pemilu] tahun 2019 juga naik sekitar 81,97%"*, kata Tito³². *Dapat disesali bahwa dalam keterangan (referensi dibawah) tidak diperjelaskan lanjut 'konflik sosial' mana yang dimaksudkan? Dan 'tim-tim terpadu' itu terdiri dari siapa-siapa? Tugasnya apa? Pengawasan macam apa? Apalagi*

²⁷ Lihat <http://nasional.kompas.com/read/2020/06/24/21243841/kota-jayapura-jadi-daerah-dengan-rasio-kasus-covid-19-tertinggi-kedua>.

²⁸ Lihat <https://seputarpapua.com/view/polres-mimika-kembali-temukan-pabrik-miras-lokal-di-sp-4-warga-tertutup-soal-pemilikinya.html>

²⁹ Lihat <https://www.pasificpos.com/polisi-tangkap-badar-sekaligus-pengedar-ganja-di-kota-jayapura/>

³⁰ Lihat <https://www.jagatpapua.com/polisi-ungkap-sindikat-tambang-ilegal-di-pegaf-4-tersangka-diamankan/>

³¹ Lihat <https://www.pasificpos.com/penambangan-emas-ilegal-di-kota-jayapura-digrebek-polisi/>

³² Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200624161409-20-516999/ada-tim-terpadu-tito-klaim-konflik-sosial-turun>

pengawasan secara khusus pada Ormas, kenapa? Juga kurang jelas dasarnya dinyatakan bahwa 'demokrasi meningkat' selama ini; mungkin benar kalau hanya memakai 'partisipasi dalam Pemilu' sebagai tolok ukur; namun sulit dibenarkan kalau diukur dengan 'ruang kebebasan mengungkapkan pendapat dan opini' mengingat bahwa makin banyak upaya pemerintah atau aparat untuk membungkamkan warga yang kritis. Apalagi kalau diklaim bahwa 'tingkat demokrasi' membaik di Indonesia, sistem pengawasan, termasuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas, dapat berkurang juga..., malahan sepatutnya dihilangkan!

25. Berhubungan dengan Pemilu kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak di 11 kabupaten di Papua 9 Des 2020, Fraksi Nasdem DPR Kab Yahukimo mengharapkan bahwa proses pemilihan akan dijalankan dengan benar, dan tidak diganggu lagi dengan adanya 'kotak kosong'³³. Istilah itu menunjukkan ke arah 'adanya permainan yang tidak jelas' yang sering mengakibatkan banyak konflik horizontal di tempat.
26. Selama bulan-bulan terakhir ini sejumlah terdakwa 'makar' sudah ditangani dalam persidangan di Jayapura, Nabire, Sorong dan Balikpapan. Tapi masih ada yang belum seperti persidangan terhadap para tahanan politik di *Fakfak*. Sidang mereka sedang berjalan, dan organisasi mahasiswa menuntut supaya persidangan itu dijalankan *offline* dan *terbuka* untuk umum³⁴. Jumlah terdakwa makar di *Fakfak* 22 orang; mereka ditahan berhubungan dengan tuduhan bahwa menjelang tanggal 1 December 2019 mereka menyiapkan diri untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora. Mereka dalam persidangan yang berjalan didampingi kuasa hukum dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua.
27. Sekali lagi ada berita yang memprihatinkan sekitar peranan para investor di Papua. Media Mongabay, salah satu pemantau kritis kegiatan deforestasi dan investor, mengangkat persoalan bahwa ternyata ada perusahaan yang bersedia membayar 22 juta dollar kepada seorang 'ekspert' di Papua supaya dapat memperlancarkan suatu mega-konsesi di Papua³⁵. Juga *News agency, Aljazeera*, mengangkat persoalan ini dan berniat dalam investigasinya³⁶. Ternyata Papua masih tetap 'dijual habis' oleh oknum-oknum/organisasi yang merebut keuntungan melulu dan kurang berniat pada kepentingan masyarakat³⁷. Celaka besar!
28. Menjelang 1 Juli, tanggal peringatan kemerdekaan Papua, 2000 anggota TNI/Polri dikerahkan menjaga keamanan di tiga Kabuptan yang dinilai rawan. Yang dimaksudkan Kabupaten Mimika, Puncak Jaya dan Intan Jaya³⁸.
29. Brimob sebanyak 96 orang dari Sulawesi Tengah siap dikirim ke Papua untuk melayani keamanan di Puncak Jaya³⁹, sedangkan Kodam Medan (27/6/2020) akan mengirim tahun 2020 Satgas Aparat Teritorial ke Kodam XVII/Cendrawasih dan Kodam XVIII/Kasuari di Papua. Tugasnya: pengembangan dan pembangunan Kodim di kedua wilayah militer itu⁴⁰. ***Ternyata belum ada penarikan, sebaliknya hanya ditambah terus saja.***
30. Tetap ada usaha supaya permasalahan di Papua diselesaikan dengan menyelenggarakan suatu dialog (28/6/2020). Wakil Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Warinussi, mengajak Presiden untuk mulai menyelenggarakan *dialog Jakarta-Papua* untuk menyikapi aspirasi politik rakyat Papua. Inti aspirasi itu: diberikannya kesempatan yang adil untuk menentukan nasib sendiri. Hak itu terjamin

³³ Lihat <https://www.ceposonline.com/2020/06/25/pastikan-tak-ada-kotak-kosong/>

³⁴ Lihat <https://suarapapua.com/2020/06/23/mahasiswa-minta-sidang-23-tapol-di-pn-fakfak-dilakukan-offline-dan-terbuka/> dan <http://fransiskanpapua.org/2020/06/24/laporan-koalisi-kriminalisasi-pasal-makar-bagi-orang-papua/>

³⁵ Lihat <https://news.mongabay.com/2020/06/the-consultant-why-did-a-palm-oil-conglomerate-pay-22m-to-an-unnamed-expert-in-papua/>

³⁶ Lihat <https://www.aljazeera.com/programmes/101east/2020/06/200625081849050.html>

³⁷ Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=cBbVu1ZOpYY>

³⁸ Lihat <https://hot.grid.id/read/182220000/hari-kemerdekaan-papua-barat-di-depan-mata-tni-langsung-kirim-ribuan-pasukan-agar-tak-kecolongan-3-wilayah-ini-jadi-target-utama?page=all>

³⁹ Lihat <https://regional.kompas.com/read/2020/06/29/14365821/96-personel-brimob-polda-gorontalo-dikirim-ke-puncak-jaya-papua>

⁴⁰ Lihat <https://papua.antaraneews.com/berita/564618/pangdam-ibb-berangkatkan-satuan-tugas-apter-ke-kodam-xvi-pattimura>

dalam UUD 1945. Maka, sebagai langkah awal diharapkan supaya Presiden dengan segera menunjukkan seorang *tokoh kunci* untuk dialog itu⁴¹.

31. Update Covid-19 30 Juni: Kasus positif: 1.719; Perawatan 832; Sembuh: 869; Meninggal: 18; ODP: 2.885; PDP: 247; TES PCR 13.855⁴².

COVID-19 30 Juni 2020	Jmlh Positif	Jmlh Dirawat	Jmlh Sembuh	Jmlh Meninggal	ODP	PDP
Kota Jayapura	898	585	302	11	873	151
Kab Mimika	391	63	322	6	1.346	14
Kab Jayapura	196	111	84	1	26	43
Kab Biak Numfor	82	16	66	0	1	9
Kab Keerom	47	25	22	0	0	5
Kab Nabire	24	10	14	0	74	0
Kab Jayawijaya	23	5	18	0	43	0
Kab Boven Digoel	17	0	17	0	13	0
Kab Merauke	16	0	16	0	24	1
Kab Sarmi	7	4	3	0	24	1
Kep. Yapen	9	8	1	0	25	0
Kab Mambera- mo Tengah	2	0	2	0	0	0
Kab Superiori	2	0	2	0	21	0
Kab Yalimo	2	2	0	0	37	0
Kab Waropen	1	1	0	0	3	0
Kab Lanny Jaya	1	1	0	0	6	0
Total	1.719	832 = 48%	869 = 51%	18 = 1%		
<i>Orang dalam Pemantauan (ODP)</i>	2.885	<i>PDP</i>	247	<i>Tes PCR 13.855</i>		

Sejumlah catatan sekitar perkembangan berkaitan dengan Covid-19:

- Jumlah kasus positif di Provinsi Papua sangat meloncat ketimbang data 14 Juni 2020: jumlah Covid positif naik dari 1.255 ke 1.719; yang dirawat dari 795 ke 832; yang sembuh dari 445 ke 869; yang mati dari 15 ke 18. Jumlah tes naik 73%, dari 8.686 menjadi 13.855. *Kota Jayapura* tetap menjadi epicentrum utama dimana dalam 14 hari jumlah Covid-positif naik dari 602 menjadi 898, suatu *kenaikan dengan 50%, artinya naik 20 pasien setiap hari!* Maka Jayapura Kota sudah menjadi no. 2 di tingkat nasional Indonesia dengan rasio 108 per 100.000 orang.
- Ternyata di Timika ojek sudah mulai diperbolehkan mengambil penumpang dan tempat-tempat rekreasi mulai dibuka untuk umum.
- Pemakaian mesin PCR sudah jadi diuji coba di RSUP Manokwari di Provinsi Papua Barat. Dengan demikian hasil 'tes swab' dapat diketahui dalam beberapa jam saja, dan tidak perlu tunggu lagi satu minggu.
- Ternyata para tenaga pasar dan perdagangan dinilai sebagai suatu kelompok 'sensitif Covid-'9' maka suatu tes massal sedang dijalankan⁴³. Ternyata banyak kena!
- Untuk memakai penerbangan dari dan ke Timika pemerintah Kab Mimika hanya meminta 'tes cepat' saja, tidak perlu 'tes swab'. Selama beberapa hari terakhir sudah dua ribuan penumpang diterbangkan.
- Di Kota Jayapura diadakan 'sweeping masker' (24/6/2020). Ternyata masyarakat di Jayapura dan sekitarnya masih sangat kurang berdisiplin dalam menaati peraturan lawan Covid-19.

⁴¹ Lihat <https://strategi.co.id/koordinator-jdp-minta-presiden-ri-segera-dialog-damai-bersama-rakyat-papua/>

⁴² Info Grafis, 30 Juni 2020, 17.00 WIT, Provinsi Papua

⁴³ Lihat <https://www.nokenlive.com/2020/06/17/495-pedagang-pasar-pagi-kota-jayapura-ikuti-repid-test/> dan <https://www.nokenlive.com/2020/06/23/1-800-pedagang-pasar-youtefa-ikuti-rapid-test-covid-19/>

- Dengan membuka bandara dan pelabuhan hingga pesawat- dan kapal-penumpang mulai jalan lagi, biar terbatas frekwensinya, juga banyak warga yang berbulan-bulan tertahan di Jayapura, Timika, Manokwari dan kota lainnya minta bantuan untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Ternyata ribuan orang.
- Menurut Pemda Provinsi Papua bahan pangan, terutama beras, masih terjamin dan aman (selama 3 bulan). Juga bahan makan lokal masih cukup tersedia di pasar.
- Selama pandemic Covid-19 banyak rapat diadakan dan lazimnya di salah satu hotel. Di Mimika ada seruan supaya pemanfaatan hotel ditawarkan secara adil, dan bukan saja kepada satu-dua hotel saja.
- Data Covid-19 25/6/2020: jumlah positif Covid-19 di Kota Jayapura tambah 45 orang menjadi 810; maka, kenaikan terus sangat signifikan.
- Karena banyak pedagang di pasarnya dites positif, pasar Youtefa ditutup, sekurang-kurangnya untuk 3 hari.
- Kesannya bahwa Covid juga sangat mahal. Pemerintah Kota Jayapura sudah mengeluarkan dana sebesar 18 milyar.

“Kita tidak bisa mentolerir atau menutup mata terhadap rasisme dan pengucilan dalam bentuk apa pun dan juga mengklaim membela kesucian kehidupan manusia. Kita juga harus mengakui bahwa kekerasan merusak diri sendiri dan menghancurkan diri sendiri. Tidak ada yang diperoleh dengan kekerasan dan begitu banyak yang hilang”.
(kutipan kata-kata Paus Fransiskus dalam Audiens Umum tgl. 3 Juni 2020)⁴⁴

Jayapura, 6 Juli 2020
Theo van den Broek

⁴⁴ Lihat <https://penakatolik.com/2020/06/20/intervensi-takhta-suci-pada-debat-pbb-tentang-rasisme-diskriminasi-rasial-tak-dapat-ditoleransi/>